

**IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA SENDAI TERHADAP
INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

AMANDA NURRA MULYANA

2110852029

Pembimbing I: Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si

Pembimbing II: Diah Anggraini Austin, S.IP, M.Si



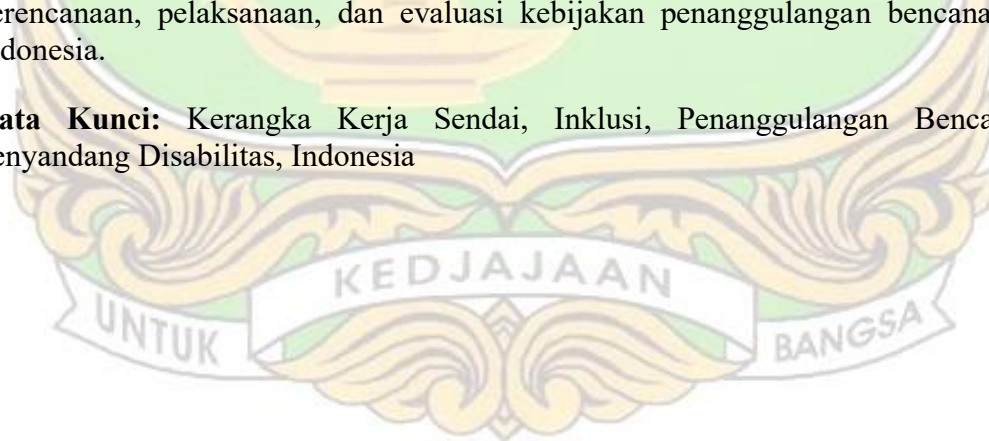
**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIOAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Kerangka Kerja Sendai mendorong perlindungan dan inklusi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif. Indonesia sebagai negara dengan tingkat frekuensi dan kerentanan bencana yang tinggi, telah mengadopsi Kerangka Kerja Sendai ke dalam berbagai kebijakan nasional, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen perencanaan pembangunan dan kebencanaan. Adopsi tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap pengurangan risiko bencana yang berorientasi pada pendekatan *people-centered* dan inklusif, termasuk perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) diimplementasikan dalam penanggulangan bencana yang inklusif di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas pada periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana analisis dilakukan dengan menggunakan konsep rezim internasional oleh Stephen D. Krasner serta teori *domestic implementation of international regimes* oleh Gianluca Ferraro untuk memahami proses implementasi kerangka internasional ke dalam kebijakan dan praktik nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi kebijakan, serta analisis terhadap dokumen nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip inklusi penyandang disabilitas dalam Kerangka Kerja Sendai telah terintegrasi dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 sebagai pedoman penanggulangan bencana Indonesia, implementasinya masih bersifat normatif dan belum terlaksana secara sistematis. Kesenjangan implementasi tercermin dari bagaimana Kerangka Kerja Sendai masih bersifat normatif, masih terbatasnya ketersediaan serta akses terhadap data terpilah disabilitas, meskipun DTSEN telah dikembangkan sebagai pusat data nasional, lemahnya regulasi turunan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya aksesibilitas layanan kebencanaan, serta terbatasnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Kata Kunci: Kerangka Kerja Sendai, Inklusi, Penanggulangan Bencana, Penyandang Disabilitas, Indonesia



ABSTRACT

The Sendai Framework encourages the protection and inclusion of persons with disabilities in the implementation of inclusive disaster management. Indonesia, as a country with a high frequency of and vulnerability to disasters, has adopted the Sendai Framework into various national policies, both in the form of legislation and development and disaster management planning documents. This adoption reflects the state's commitment to disaster risk reduction based on a people-centered and inclusive approach, including the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how the Sendai Framework is implemented in inclusive disaster management in Indonesia, particularly for persons with disabilities in 2020–2024. This research employs a qualitative method, with analysis conducted using the concept of international regimes by Stephen D. Krasner and the theory of domestic implementation of international regimes by Gianluca Ferraro to understand the process of translating international frameworks into national policies and practices. Data were collected through interviews, policy document analysis, and the review of relevant national and international documents. The findings indicate that although the principles of disability inclusion in the Sendai Framework have been integrated into Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020–2044 as a guiding document for disaster management, their implementation remains largely normative and has not been carried out systematically. The implementation gap is reflected in the continued normative nature of the Sendai Framework, the limited availability and accessibility of disaggregated disability data, despite the development of DTSEN as a national data center, weak derivative regulations, limited institutional capacity, low accessibility of disaster services, and the limited involvement of persons with disabilities in the planning, implementation, and evaluation processes of disaster management policies in Indonesia.

Keywords: *Sendai Framework, Inclusion, Disaster Management, Persons with Disabilities, Indonesia*

